

EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA KECAMATAN KOTAPINANG LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017-2019

Efficiency Of Regional Expenditure Budget In Kotapinang Labuhanbatu Selatan District 2017-2019

Yulia Kasih

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: yuliakasihnasution@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

02-10-2021

RevisiPertama :

09-06-2022

Diterima :

23-06-2022

Kata Kunci :

*Anggaran, Efisiensi,
Belanja Daerah*

Keywords :

*Budget, Efficiency, Regional
Expenditure*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kotapinang dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengukuran tingkat efisiensi belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan Kecamatan. Peneliti menggunakan teori efisiensi menurut Mahmudi (2015:85). Dengan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pengukuran efisiensi anggaran belanja Kecamatan Kotapinang tahun 2017-2019 dikategorikan Efisien dengan rata-rata tingkat pengukuran berada dibawah 100%. (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sudah cukup optimal karena Kecamatan Kotapinang sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik. (3) Kesesuaian Realisasi Anggaran Belanja dengan Program/Kegiatan belum optimal karena kurangnya perencanaan awal dan manajemen kepemimpinan berkaca pada dokumen tahun sebelumnya. (4) Sumber Daya Manusia Kecamatan Kotapinang belum optimal di karenakan masih kurang SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

Abstract

This research was conducted in Kotapinang District and aims to find out how much the measurement of the efficiency of regional spending in increasing district income by using efficiency theory according to Mahmudi (2015:85). With descriptive research method qualitative approach. The results of this study show that (1) The level of measurement of the efficiency of the Kotapinang District budget for 2017-2019 is categorized as Efficient with the average measurement level below 100%. (2) The implementation of Regional Expenditures has been quite optimal because Kotapinang district has been able to realize the budget properly. (3) The suitability of Budget Realization with Programs/Activities has not been optimal due to lack of initial planning, Leadership Management looks at the previous year's Document. (4) Human Resources in Kotapinang Sub-district are not optimal because there are still insufficient human resources, both in terms of quality and quantity.

A. PENDAHULUAN

Laporan Keuangan pemerintahan daerah dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai operasional daerah. Hal ini juga yang akan menjadi tolak ukur kinerja agar bisa di pertanggung jawabkan akhir tahun anggaran. Melalui laporan keuangan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana

keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara/Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Pelaksanaan anggaran belanja akan memberikan implikasi bagi pemerintah dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja daerah. Dimana efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Dan juga Kecamatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan perumusan, pelaksanaan dan pelaporan aset anggaran yang ada di Kecamatan itu sendiri. Dalam keuangan Kecamatan, Camat sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di Kecamatan. Sesuai Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai Program/Kegiatan pada Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama satu periode.

Tabel 1. Laporan Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	3.359.888.197,00	2.945.244.303,00	87,66%
2018	2.991.454.497,00	3.016.003.878,00	100,82%
2019	6.415.860.597,00	5.933.461,173.00	92,48%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kotapinang tahun 2017-2019

Di jelaskan dari tabel bahwa anggaran belanja Kecamatan Kotapinang terlihat dari tingkat presentasi nya dimana anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Namun realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski begitu jauh dari tingkat presentasi tidak stabil masih berada dibawah 100% hal ini berarti membuktikan bahwa belanja daerah selama 3 tahun tersebut masih kurang terealisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dalam merealisasi anggaran belanja kurang optimal, di antaranya lemahnya dalam perencanaan atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena yang di rencanakan dari beberapa program/kegiatan ini tidak sesuai dengan yang di inginkan.

Pada Laporan Keuangan Kecamatan menunjukkan adanya kegiatan yang tidak terealisasi dengan sempurna ditahun 2017-2019 dan tidak terserap dibawah 50%. Hal ini menjadi faktor pemicu tidak efisien dalam penganggaran belanja dengan realisasinya. Sehingga menjadi kendala tidak terserap anggaran belanja secara efektif. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan pada Kecamatan Kotapinang setiap tahun rata-rata sudah terealisasikan. Hanya ada beberapa kegiatan saja yang tidak terealisasi atau tidak terlaksana dengan sempurna. Penyerapan anggaran belanja yang di sediakan oleh pemerintah daerah akan memberikan dua aspek yang pertama bisa menunjukkan adanya efisiensi anggaran dan kedua jika terjadi selisih kurang maka akan terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja yang kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena ada program/kegiatan yang tidak terlaksana atau kendala lainnya.

Kajian administrasi keuangan daerah mempersoalkan tentang pengelolaan (manajemen) keuangan Negara agar dapat mewujudkan tiga kriteria utama dalam ilmu administrasi, yaitu terwujudnya atau tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan produktif dalam rangka peningkatan kualitas publik dari waktu ke waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5 dalam Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:24), Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan belanja daerah. Dimana keuangan inilah yang akan di gunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mahmudi (2015:85) Mengatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan di katakan efesiensi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Memiliki hubungan antara *output* berupa pelayanan atau barang yang di hasilkan dengan sumberdaya yang di hasilkan untuk menghasilkan *output* tersebut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Keseluruhan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara perbandingan *output* dan *input* serta adanya proses dalam menjalankan kegiatan yang di katakan dengan efisiensi jika suatu target kegiatan atau program tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya dan *output* yang sebesar-besarnya. Maka tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja. Maka rumus perhitungan dapat diukur dengan;

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Merujuk kriteria efisiensi sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Anggaran Belanja

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% Sampai 100%	Kurang Efisien
80% Sampai 90%	Cukup Efisien
60% Sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kementerian dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:15) penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada *postpositivisme* karena dalam penelitiannya meneliti tentang kondisi objek bersifat alamiah yang berlawanan dengan penelitian *eksperimen* dan peneliti sebagai *instrumen* pertamanya, serta mementingkan makna dari pada generealisasi. Pada penelitian kualitatif menghasilkan data-data hasil wawancara dan juga arsip dokumen dari Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan berbentuk laporan keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA) yang menyediakan angka-angka dari segi anggaran dan juga realisasinya dalam satu tahun laporan yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai bahan analisis untuk membuktikan kebenarannya. Dalam memperoleh data penelitian menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan (Dokumentasi). Dalam melakukan wawancara penelitian menggunakan teknik *purposive Sampling* untuk menentukan informan yang di pilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dan relevan pada permasalahan yang di teliti yaitu pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja Daerah

Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan. Menurut Sugiyono (2014:120) *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Teknik Analisis Data yang di lakukan diambil dari Model Mils dan Huberman (Sugiyono, 2012:246), dimana analisa data ini di lakukan dengan tiga tahap yaitu; Reduksi, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Reduksi adalah rangkuman dalam memilih hal penting yang menjadi fokus penelitian. Penyajian data berupa uraian singkat ataupun hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan terakhir Penarikan Kesimpulan adalah rangkuman dan hasil keseluruhan dari catatan-catatan yang telah diteliti (Silalahi, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan, dilakukan untuk mengetahui rasio efisiensi dari anggaran belanja, dalam pengukuran tersebut peneliti melakukan perhitungan melalui data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi
2017	2.783.839.303,00	2.945.244.303,00	94,51%
2018	2.987.003.878,00	3.016.003.878,00	99,03%
2019	4.697.578.173,00	5.933.461.173,00	79,17%

Sumber : Diolah oleh Penulis

Hasil analisis yang di lakukan peneliti bahwa realisasi anggaran belanja lebih besar daripada realiasi belanja langsung sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan realisasi anggaran. Maka untuk rasio efisiensi Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan yang diukur dalam 3 (tiga) tahun, dimana;

1. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.783.839.303,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 2.945.244.303,00 dengan rasio efisien 94,51% yang termasuk dalam kategori Efisien karna untuk tahun 2017 berada pada tingkat pencapaian 90% sampai 99%.
2. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.987.003.878,00 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3.016.003.878,00 dengan rasio efisiensi 99,03% yang termasuk dalam kategori cukup efisien karna untuk tahun 2018 berada pada tingkat pencapaian dari 100%.
3. Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 4.697.578.173,00 dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.933.461.173,00 dengan rasio efisiensi 79,17% yang termasuk dalam kategori sangat Efisien karna tingkat pencapaian kurang dari 90%. Dapat di katakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja di setiap tahunnya mengalami kenaikan, dan terserap sangat baik. Untuk rasio paling rendah berada pada tahun 2018 sebesar 99,03% dan di kategorikan cukup efisien. Namun juga begitu, secara keseluruhan Kecamatan Kotapinang sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik.

Mahmudi (2019:164) mengatakan bahwa pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi jika rasionya kurang dari 100%, sebaliknya apabila melebihi maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Dapat di katakan untuk tahun 2017-2019 Kecamatan Kotapinang sudah mampu menggunakan sumber daya yang di perlukan dengan mengefisiensikan pengeluaran untuk mencapai target yang dicapai. Dan di buktikan hasil wawancara dengan informan bahwa Kecamatan Kotapinang sudah mampu merealisasikan anggaran sampai pada presentasi 80-90% dengan kategori efisien. Dan

hal itu juga sama seperti hasil perhitungan yang di lakukan peneliti bahwa tingkat efisiensi berada dibawah 100% kategori efisien.

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan anggaran harus di dasarkan pada sasaran dan kebijakan tertentu dalam menggambarkan komponen dangan tingkatan pelayanan yang akan dicapai dalam tahun anggaran bersangkutan.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Tahun 2017-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	3.359.888.197,00	2.945.244.303,00	87,66%
2018	2.991.454.497,00	3.016.003.878,00	100,82%
2019	6.415.860.597,00	5.933.461.173,00	92,48%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kotapinang

Mahmudi (2010:159) mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang terlalu rendah tidak baik karena mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun dengan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak ada pemborosan anggaran sehingga lebih efisien.

Dapat dilihat dari tabel bahwa Kecamatan kotapinang sudah mampu merealisasi anggaran diatas 80% walaupun dalam merealisasikan ada beberapa kendala akan tetapi Kecamatan Kotapinang sudah mampu mengatasi dengan taarget yang sesuai. Hal ini juga dibuktikan dengan laporan Keuangan Kecamatan tahun 2017-2019 dimana realisasi cukup stabil. Dan tingkat presentasi terendah ditahun 2017 sebesar 87,66%. Namuntahun 2018 dan 2019 realisasi sudah cukup baik. Untuk tahun 2018 dapat di jelaskan bahwa realisasi melebihi anggaran di karenakan adanya belanja yang bersifat mendesak. Seperti pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, tambahan penghasilan PNSD dan pembayaran rekening listrik, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penyediaan Anggaran Belanja yang bersifat mendesak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 dan telah ditampung dalam DPPA Kecamatan Kotapinang tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Kesesuaian Realisasi Anggaran Belanja dengan Program/Kegiatan

Perencanaan Program/Kegiatan merupakan proses dasar bagi Organisasi dalam memilih sasaran dan menetapkan bagaimana Organisasi tersebut mencapai tujuan dalam merealisasikan anggaran dengan Program/Kegiatan.

Tabel 5. Laporan Program/Kegiatan yang tidak Terealisasi Kecamatan Kotapinang

Tahun	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	82.600.000,00	33.899.250,00	33,09%
2018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36.400.000,00	8.685.000,00	23,86%
2019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	16.300.000,00	8.340.000,00	51,72%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kotapinang

Mahmudi (2015:73) mengungkapkan pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan revisi anggaran program. Jika evaluasi program menunjukkan bahwa program yang di laksanakan tidak

efektif, maka manajer perlu mengkaji ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan, atau bahkan merivisi tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data yang dilakukan peneliti tentang pelaksanaan program yang tidak terserap dapat disimpulkan bahwa banyak kendala yang di hadapi dalam menjalankan program khususnya kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi ke Luar Daerah tidak terserap setiap tahunnya, alasan itu karena kurang perencanaan atau persiapan awal, kendala waktu dan tempat untuk melaksanakan program tersebut. Selanjutnya kesalahan ada pada Sistem Kerja Pegawai Kecamatan yang hanya melihat pada dokumen tahun sebelumnya tanpa membuat pembaharuan untuk kegiatan tersebut. atau juga bisa menggantikan program dengan kegiatan-kegiatan yang di butuhkan masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dan Dalam Daerah adalah: 1. Kurangnya koordinasi terhadap atasan atau pimpinan 2. Dalam pemilihan kendaraan Dinas/Operasional sudah sesuai dengan kebutuhannya. Faktor faktor penyebab dari beberapa Program/Kegiatan yang belum memenuhi capaian target umumnya di sebabkan karena manajemen kepemimpinan di Kantor Kecamatan Kotapinang yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang memadai, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung proses pelaksanaan beberapa pekerjaan dokumen perencanaan secara tidak tepat waktu. Namun secara teknis belum ada Program/Kegiatan di Kantor Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melebihi dari target yang di rencanakan. Dan untuk tahun-tahun mendatang, akan diupaya percepatan penyelesaian dokumen rencana, efisiensi penggunaan anggaran dan akan memaksimalkan *output* dan hasil kegiatan.

Sumber Daya Manusia Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh untuk pengembangan suatu organisasi publik karena citra organisasi akan dinilai dari kinerja Sumber Daya Manusia (Pegawai). Oleh karena itu tujuan organisasi akan tercapai dengan baik apabila pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efisien.

Tabel 6. Jabatan Struktural

No.	Jabatan Pegawai	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Staff Pelaksana	6
5.	Staff Administrasi	3
6.	Operator Komputer	4
7.	Petugas Kebersihan	2
8.	Supir	1

Sumber : Laporan Keuangan 2019

Mahmudi (2015:85) mengatakan efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan *output* tersebut.

Dilihat dari tabel peneliti menganalisis adanya persamaan pernyataan dari beberapa informan dan dibuktikan dengan Laporan Keuangan Kecamatan yakni tentang Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan belum cukup optimal di karenakan kurangnya tenaga ahli yang tidak sesuai dengan *basic* pendidikannya, dan sarana dan prasarana di kategorikan belum cukup memadai. Hal ini di buktikan juga dengan Dokumen Profil Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan di tahun 2019 bahwa secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja untuk realisasi belanja daerah dikategori belum optimal karena masih kurangnya SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yang menunjang tugas kinerja kerja Pegawai Kecamatan. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah Pegawai Kecamatan yang berjumlah 23 orang dengan jumlah Pegawai Negeri (PNS) 13 Pegawai dan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPDPK) 10 Pegawai.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang “Efisiensi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019” maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan bahwa untuk indikator tersebut sudah cukup optimal dalam merealisasikan anggaran belanjanya. Untuk tahun 2017 dengan rasio 94,51% (Efisien). Pada tahun 2018 dengan rasio 99,03% (Cukup Efisien). Dan terakhir pada tahun 2019 dengan rasio 79,17% (Sangat Efisien). Dengan rata-rata tingkat pengukuran cukup efisien karena berada dibawah 100%. Dengan begitu di tiga tahun terakhir Kecamatan Kotapinang sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik.
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah untuk indikator tersebut penulis menyimpulkan sudah cukup optimal. Karena Kecamatan Kotapinang sudah mampu merealisasikan anggaran dengan baik, walaupun tidak semua anggaran terserap dengan sempurna tetapi Kecamatan Kotapinang dalam merealisasikan anggaran tidak pernah mencapai target dengan presentasi dibawah 80%. Di setiap tahunnya anggaran dan realisasi selalu mengalami kenaikan namun ada satu tahun anggaran yang menurun tepat di tahun 2018 sehingga realisasinya melebihi target anggaran dan dikatakan sangat efisien karena output lebih besar daripada input yang dikeluarkan.
3. Kesesuaian Realisasi Anggaran Belanja dengan Program/Kegiatan tersimpulkan belum maksimal atau belum optimal karena banyak kendala yang dihadapi dalam menjalankan program khususnya kegiatan rapat koordinasi ke luar daerah yang tidak terserap disetiap tahun. Alasan itu disebabkan : 1. Kurangnya koordinasi terhadap atasan atau pimpinan 2. Dalam pemilihan kendaraan dinas/operasional sudah sesuai dengan kebutuhannya. Faktor-faktor lain penyebab dari beberapa program/kegiatan yang belum memenuhi capaian target umumnya disebabkan karena manajemen kepemimpinan di Kantor Kecamatan Kotapinang yang mulai mengarah kepada pencapaian kinerja selain didukung oleh SDM aparatur yang belum memadai, dan kebijakan-kebijakan mendukung proses pelaksanaan beberapa pekerjaan dokumen perencanaan secara tidak tepat waktu.
4. Sumber Daya Manusia Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan bahwa indikator tersebut belum bisa dikatakan maksimal atau belum optimal dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang tidak sesuai dengan basic pendidikannya, dan sarana dan prasarana yang belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah pegawai Kecamatan yang berjumlah 23 orang dengan jumlah Pegawai Negeri (PNS) 13 pegawai dan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPDPK) 10 pegawai

Rekomendasi

Kecamatan Kotapinang harus bisa meningkatkan kembali perencanaan anggaran belanjanya dengan berbagai program yang strategis serta biaya yang relatif kecil. Dan diharapkan Kecamatan Kotapinang mampu mengalokasikan dana alokasi dengan sebaik mungkin dan tidak terlalu tinggi untuk pencapaian pendapatan yang akan diterima, sehingga dalam merealisasikan tidak terdapat banyak sisa anggaran, dan anggaran dapat terealisasikan dengan efisien mungkin. Peningkatan efisiensi ini bisa dilakukan melalui hal dasar yang yaitu Kecamatan harus melakukan dengan menyusun rencana anggaran dimulai dengan setiap Kabid untuk membentuk pagu anggaran lalu bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja dengan melakukan pengarahannya bersama pimpinan seluruh pegawai Kecamatan dengan itu agar bisa memaksimalkan penggunaan anggaran belanja sesuai dari target awal.

REFERENSI

Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan Negara. Bandung: CV Pustaka Setia

- Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Administrasi. PT Rajagrafindo Persada:Jakarta
- Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press
- Mahmudi, M. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. In Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta (3rd ed., Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPIN.
- Halim. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah). Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Soeradi. 2014. Pengelolaan Keuangan Negara. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wirman Syafri. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Erlangga
- Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019
- Buku Profil Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan Tahun 2019